

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
BAYARAN MUT'AH BAGI ISTERI YANG DICERAI
SEBELUM DIGAULI DI MAHKAMAH
RENDAH SYARIAH NEGERI**

SEMBILAN

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S1) Pada Fakultas Syariah**



L. ILHAM BIN RUDDY

NIM: SHK 101180029

PEMBIMBING :

DR. H. M. UMAR YUSUF, M.HI

DR. D.I. ANSUSA PUTRA, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I
1440H/2020M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar program strata 1 (S1) di Fakultas Syariah.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi,

Oktober 2020



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L. Ilham Bin Ruddy
NIM : SHK 101180029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Mess Pelajar Malaysia, Telanaipura

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bayaran Mut’Ah Bagi Isteri Yang Dicerai Sebelum Digauli Di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan”** Yang dimunaqasyahkan pada hari tanggal **3 Agustus 2020**.

Dengan Penguji 1 : Mustiah RH, S.Ag, M.Sy
Dengan Penguji 2 : Dian Mustika S.HI, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk Tim Penguji dan Pembimbing.
Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

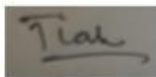
Jambi, Oktober 2020
Yang menyatakan,



L. Ilham Bin Ruddy
NIM : SHK 101170038

Telah diteliti kebenarannya, dan telah sesuai dengan keputusan Sidang Munaqasyah tanggal **3 Agustus 2020**.

Penguji I



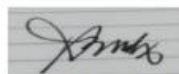
Mustiah RH, S.Ag, M.Sy
NIP: 19700706 199803 2 003

Penguji 2



Dian Mustika S.HI, MA
NIP: 19830622 201101 2 012

Sekretaris Sidang



Drs. A. Asnawi. US
NIP: 19631111 199201 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : DR. H. M. Umar Yusuf, M.HI
Pembimbing II : DR. D.I. Ansusa Putra, M.A
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi,
Jl.Jambi- Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren,
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Juli 2020

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di -
Jambi

NOTA DINAS

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca dan mengadakan pembaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara L. Ilham Bin Ruddy NIM: SHK 101180029 yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bayaran Mut’Ah Bagi Isteri Yang Dicerai Sebelum Digauli Di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan”** dapat diajukan untuk di munaqashahkan guna melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

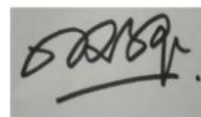
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



DR. H. M. Umar Yusuf, M.HI
NIP : 19591231 199203 1 103

Pembimbing II



DR. D.I. Ansusa Putra, M.A
NIP : 19861215 201101 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-...../D.II/PP.003/07/2020

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : “ **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bayaran Mut’Ah Bagi Isteri Yang Dicarai Sebelum Digauli Di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan**”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : L. Ilham Bin Ruddy

NIM : SHK 101180029

Telah dimunaqasyahkan pada : 3 Agustus 2020

Nilai Munaqasyah : 82.37

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Illy Yanti, M.Ag

NIP: 19710227 199401 2 001

Penguji I

Mustiah RH, S.Ag, M.Sy

NIP: 19700706 199803 2 003

Pembimbing I

Dr. H. Umar Yusuf M.HI

NIP: 19591231 199203 1 103

Penguji H

Dian Mustika S.HI, MA

NIP: 19830622 201101 2 012

Pembimbing II

Dr. D. I. Ansusa Putra.MA

NIP : 19861215 201101 1 004

Sekretaris Sidang

Drs. A. Asnawi. US

NIP : 19631111 199201 1 001

Jambi, 2020

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



SEKRETARIS

Dr. Sayuti Una, S.Ag, MH

NIP: 19570102 200003 1005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
الَّذِينَ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
(Al-Ahzab : 49)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah Bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. AL-Ahzab : 49)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bayaran Mut'Ah Bagi Isteri Yang Dicerai Sebelum Digauli Di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui status tuntutan *mut'ah* bagi istri yang dicerai sebelum digauli menurut seksyen 58, Enakmen undang-undang keluarga islam Negeri Sembilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis imperis jenis kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Perbahasan dan kesimpulan penelitian adalah seperti berikut : **Pertama**, prosedur pelaksanaan mut'ah menurut seksyen 58, enakmen undang-undang keluarga islam negeri sembilan 2003 adalah pelanggan datang ke mahkamah, mendaftarkan kes berdasarkan bidang kuasa, penerimaan pendaftaran, penjadualan kes akan dilakukan, kes tersebut akan disediakan dari segi fail kes, saman / notis pemohonan, kes akan disebut pada hari yang telah ditetapkan, perbicaraan penuh akan dijalankan, mahkamah akan menguruskan, salinan perintah akan diserahkan kepada pihak-pihak pemohon, menerima apa-apa rayuan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak berpuas hati dan proses rayuan akan diuruskan sehingga kes rayuan didengar dan diputuskan.

Kedua, penetapan bayaran mut'ah bagi isteri yang dicerai sebelum digauli dan kadar tuntutan mut'ah di dalam seksyen 58, enakmen undang-undang keluarga islam negeri sembilan 2003 adalah bersesuaian dengan solusi yang dikeluarkan oleh ulama' mazhab syafie'.

Kata kunci: ***Tuntutan Mut'ah, Prosedur, Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk insan-insan yang tercintai:

Ayahanda Ruddy bin Eddie dan Ibunda Hamisa binti Lapari yang telah mendidik dan mengasuh serta membesarkan anakanda dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, dan penuh pengharapan agar nantinya anakanda menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa, seterusnya dapat meraih cita-cita murni yang diinginkan sesuai dengan tuntunan syariat. Berkat doa yang tidak pernah putus dari keduanya penulis bisa sukses hingga saat ini dan mudah-mudahan sampai kedepan, Aamiin.

Kepada Saudara-saudariku, Abangg Nano, adik uya, adik hafiz, adik hafizah, adik zizi terima kasih di atas segala perhatian dan doa yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi di antara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya, serta menjadi sesuatu yang indah buat selama-lamanya.

Tidak terlupakan juga kepada umi saya Zaimah binti Abdul Rahman yang senantiasa memberi sokongan lewat doa mahupun bantuan materi yang tidak pernah putus sepanjang anakanda menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

Para ustaz ustazah yang pernah mendidik saya sebelum ini, ucapan tahniah yang tidak terhingga buat kalian, semoha Allah membalas jasa baik kalian.

Teman-teman, Muhammad Nur Sufi bin Ismail, Muhammad Asyraf bin Robani, Raja Muhammad Asyraf bin Raja Sulaiman, Aizuddin Yahya, Ahmad Ridha Alias serta teman teman lain yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Jambi, mahupun teman-teman dari Indonesia dan teman-teman yang berada di Malaysia, yang setia telah memberikan semangat dan dorongan di kala suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik selamanya.

Kepada seluruh dosen mahupun karyawan dan karyawanati yang turut tidak dilupakan juga untuk penulis mengucapkan terima kasih karena telah banyak membantu dan memberi dorongan untuk penulis menyiapkan skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih atas segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam turut dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai. Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bayaran Mut'Ah Bagi Isteri Yang Dicerai Sebelum Digauli Di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu syariah dalam bagian hukum. Juga memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga ke akhir menambahkan lagi daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan. Terlebih lagi untuk masa ini, penulis merasa terhambat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dikarenakan dunia mengalami Virus Covid-19. Berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

diselesaikan seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pembaca dan peneliti.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi, Indonesia, Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As'ad Isma, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S. Ag., MA selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
3. Bapak Agus Salim, MA., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.
4. Ibu Mustiah, S.Ag., M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Irsyadunnas N, S.H, MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari"ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

5. Bapak Dr.H. M. Umar Yusuf,. M.HI. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.D.I. Ansusa Putra,. MA. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Para Guru yang mendidik saya dari TK hingga ke saat ini.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknis penulisan, analisis data, penyusunan maklumat maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada bahan skripsi ini. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah SWT dan mendapatkan ganjaran yang selayaknya kelak.

Jambi Mei 2020,

Penulis,

L.ILHAM BIN RUDDY

SHK 101180029

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	11
G. Tinjauan Pustaka.....	18
BAB II: METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	21
B. Jenis Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Metode Pengumpulan Data.....	23
E. Teknis Analisis Data.....	24
F. Sistematika Peulisan	27
BAB III: GAMBARAN UMUM MAHKAMAH SYARIAH NEGERI SEMBILAN	
A. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Syariah.....	29
B. Struktur pentadbiran jabatan kehakiman syariah.....	33
C. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah	35
D. Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan Tujuan	36

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Status Bayaran <i>Mut'ah</i>	46
B. Kadar Bayaran <i>Mut'ah</i>	54
C. Prosuder Tuntutan <i>Mut'ah</i>	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	72
C. Kata Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
SWT.	: Subhanahuwata'ala.
SAW.	: Sallallahu alaihiwasallam.
ra.	: Radiallahu'an.
No.	: Nomor.
Q.S	: Al-Quran Dan Sunnah.
cet.	: Cetakan.
Hlm	: Halaman.
t.t	: Tanpa Tahun
Syafie	: Imam Syafie
Syafiiyyah	: Pengikut Imam Syafie
AUKI	: Undang Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan
JKSM	: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
RM	: Ringgit Malaysia

TRANSLITERASI

ا	a	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ء	'
		ي		y			

Ā	a panjang
Ī	i panjang
Ū	u panjang

او	au
أى	ay

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah, bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram¹.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya,ialah dia menciptakan untukmu istri istrimu dari jenismu sendiri,supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepada-nya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”².

Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW. pun menegaskan dalam Sabdanya: “Dari Ahmad bin al-Azhar, dari Adam, dari Isa bin Maymun, dari al-Qasim, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Nikah* itu adalah

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja,2003), Cet. 1, h.1.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Ar-Ruum (30) : 21*

sunnahku, siapa saja yang tidak melaksanakan sunnahku maka bukanlah termasuk ummatku” (HR. Ibnu Majah)³.

Kendatipun perkawinan tersebut suatu ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai suatu yang *alamiah* karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut *talak*⁴.

Nilai pernikahan dalam Islam merupakan ibadah atau. Oleh karena itu apabila pernikahan tersebut putus atau terjadi perceraian, maka tidak serta merta urusannya selesai begitu saja akan tetapi terdapat akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai, bahkan bukan hanya putus pernikahan karena bercerai saja, meskipun karena kematian salah satu pihak tetap memiliki konsekuensi hukum tersendiri⁵.

Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak dan kewajiban antara kedua suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian di satu pihak

³ CD al-Maktabah al-Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, No. Hadis: 1836.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.8-9

⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Dalam Islam*, cet. Ke-1, h. 283.

dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri ketika terjadinya akad perkawinan⁶.

Seiring dengan terjadinya perceraian, maka akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban baik dari pihak mantan suami maupun mantan istri. Salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah bagi pihak mantan suami kepada mantan istrinya. Karena banyaknya nafkah yang timbul akibat perceraian, seperti: hak nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madiyyah*, dan *hadanah*, maka penulis membatasi hanya membahas masalah *mut'ah* dalam penulisan ini.

Mut'ah secara bahasa berarti kesenangan. Menurut *madzhab* Syafi'i, *mut'ah* adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan isteri) karena ia menceraikannya. *Mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara *thalaq*⁷ Menurut al-Imam Zakaria al-Anshari didalam kitab , *Asna al-Mathalib syarah kepada Raudh ath-Thalib* :

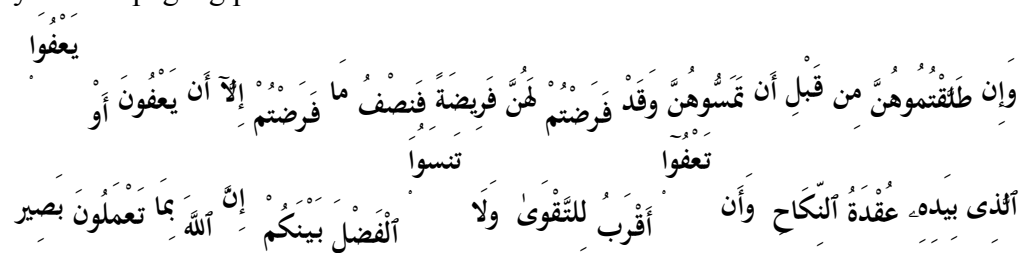
الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُنْعَةِ - هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لَامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا

⁶ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 76.

⁷ Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997, hlm. 317

“Bab kelima tentang *mut’ah*. *Mut’ah* adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya”⁸.

Imam Syafi’i berpendapat, seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya *qabla dukhul* baginya setengah mahar yang sudah ditentukan saat akad nikah.⁹ Imam syafi’i berpegang pada dalil :



“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁰.

Berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang menentukan secara tegas tentang kewajiban memberikan *mut’ah* bagi wanita yang telah di halaq |. Menurut al-Turmudzy, 'Aṭa', dan al-Nakha'iy perempuan yang di-*khulu*' tetap

⁸ (Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319)

⁹ Asy-Syaikh al-Imam Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali, *al-Mahdzab fii Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 2, Dar Al-Fikr, hlm. 59

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* Al-Baqarah: 237



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berhak mendapatkan *mut'ah*. Sementara menurut ulama ahlu al-ra'yi, perempuan yang *dili'an* juga tetap berhak mendapatkan *mut'ah*.

Imam Hanafi mengatakan, suami yang menceraikan istrinya tidak mendapat apapun dari mahar, tetapi istri mendapatkan *mut'ah* saja. *Mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan mahar untuknya.¹¹ Sama halnya seperti yang telah disebutkan oleh Imam As-Sarkhasi, bahwa Imam Hanafi dan Imam Muhammad berpendapat, istri yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul* hanya mendapatkan *mut'ah*.

“Dan jika istri dicerai *qabla dukhul* dengan pendapat Abu Yusuf yang pertama istri mendapatkan setengah dari mahar wajib setelah akad, dan ini untuk mahar *musamma* saat akad lalu kembali lagi dan berkata istri mendapat *mut'ah* dan ini pendapat Imam Hanafi dan Muhammad.”¹²

Dan *qaul* yang berbunyi:

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang *mut'ah* dalam beberapa pasal (salah satunya) menurut kita (Hanafiah) *mut'ah* itu hukumnya wajib”.¹³

Masalah tuntutan *mut'ah* di Malaysia pada hari ini seperti sudah menjadi kebiasaan bagi sesetengah pasangan suami istri sehingga terkadang menjadi

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 622

¹² Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 65

¹³ *Ibid*, hlm. 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jalan bagi sang istri untuk membalas dendam atas perceraian yang berlaku melalui tuntutan *mut'ah* di Mahkamah Syariah. Sering terjadi di Malaysia tuntutan *mut'ah* oleh mantan istri terhadap mantan suami dengan bayaran yang cukup lumayan pada kasus tuntutan *mut'ah* bagi istri yang dicerai.

Hal ini terjadi karena tidak ada penetapan bayaran *mut'ah* menurut undang-undang yang menjadi penyebab mantan istri bisa menuntut dengan kadar bayaran tinggi daripada mantan suami di Mahkamah Syariah. Hal ini bisa dirujuk pada jurnal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang diambil melalui Mahkamah Syariah Negeri Sembilan, berkenaan kasus tuntutan *mut'ah* di Malaysia yanguntutannya cukup lumayan tinggi. Berikut ialah senarai dan nota ringkas beberapa kes rujukan/pilihan berkaitan tuntutan *mut'ah* yang telah di putuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan dan di laporkan di dalam Jurnal Hukum JKSM dari tahun 1995 hingga 2011.

- I. RUSIAH BINTI ISMAIL v MOHD. RAFI HEINGES BIN ABDULLAH 13 [1999] 2 JH 227 Pasangan bercerai dengan *talaq* satu. Plaintiff menuntut antara lain bayaran *mut'ah* sebanyak RM25,550.00 yang dikira pada kadar RM5.00 sehari. Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan meluluskan tuntutan *mut'ah* setakat sebanyak RM5,000.00 sahaja.
- II. SERIMAH BINTI ABD. RAHIM v MUHAMMAD HAKIMI BIN MARZUKI 14 [2001] 1 JH 47. Dalam kes ini Defendan berpendapatan kasar RM2,084.00 sebulan dan gaji bersihnya sebanyak RM1,825.00. Plaintiff menuntut bayaran *mut'ah* sebanyak RM4,000.00. Mahkamah

Syariah Negeri Sembilan memerintahkan bayaran *mut'ah* sebanyak RM1,000.00 dan dibayar secara ansuran RM100.00 sebulan¹⁴.

Tuntutan *mut'ah* yang sering terjadi hanya pada kasus istri yang dicerai ba'da dukhul atau setelah masa perkawinan yang panjang. Manakala permasalahan tuntutan *mut'ah* bagi isteri yang dicerai sebelum digauli di Malaysia terlebih khusus di Negeri Sembilan tidak begitu banyak karena masyarakat tidak mengetahui bahawa hal ini ada penyelesaian dalam Undang-Undang dan juga telah disebut dalam Al-Quran, Hadis serta pendapat para Ulama.hal ini terjadi disebabkan masyarakat kurang membaca dan mencari tahu terkait masalah tuntutan *mut'ah* bagi isteri yang dicerai sebelum digauli. Menurut Statistik kasus Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan tahun 2016 sehingga 2019 jumlah kasus tuntutan *Mut'ah* sebanyak 165 kasus, dan yang berjaya diselesaikan sebanyak 84 kasus. Kesemua kasus ini terkait dengan tuntutan *Mut'ah* bagi isteri yang dicerai setelah digauli. Manakala kasus tuntutan *Mut'ah* bagi isteri yang dicerai sebelum digauli tidak ada sepanjang tahun 2016 sehingga 2019. Berikut merupakan statistik yang penulis dapatkan daripada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan dalam kasus SULH mengikut jenis kasus sepanjang tahun 2016 sehingga 2019.

¹⁴ http://guamansyariah.blogspot.com/2013/03/kes-tuntutan-mutah-yang-dilaporkan_2.html.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

STATISTIK KES SULH MENGIKUT JENIS KES

JENIS KES SULH	DAFTAR	SELESAI			JUMLAH SELESAI	DALAM MAJLIS SULH
		BERJAYA	GAGAL	TIDAK HADIR		
009 - Tuntutan Gantirugi Pertunangan	1	0	1	0	1	0
016 - Tuntutan Muta'ah	165	84	46	35	165	0
017 - Tuntutan Harta Sepencarian	137	82	32	23	137	0
018 - Tuntutan Nafkah Isteri	23	14	3	6	23	0
021 - Tuntutan Nafkah Eddah	154	95	24	35	154	0
022 - Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah Anak/Isteri/Lain-lain	78	32	16	30	78	0
023 - Tuntutan Tunggakan anak/isteri/lain-lain	17	6	7	4	17	0
024 - Tuntutan Nafkah Anak	288	187	34	67	288	0
025 - Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak	50	26	10	14	50	0
027-Tuntutan Membatalkan Perintah Nafkah	1	0	0	1	1	0
028 - Tuntutan Hadhanah	394	257	48	89	394	0
037 - Saman Penghutang Penghakiman	1	0	0	1	1	0
049 - Tuntutan Gantirugi Perkahwinan/Hutang Perkahwinan	21	7	6	8	21	0
055 - Tuntutan Perceraian	3	1	0	2	3	0
060 - Tuntutan Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula	0	0	0	0	0	0
062 - Tuntutan Isteri Kembali Taat	46	20	13	13	46	0
083 - Tuntutan Hak Jagaan Anak Tak Sah Taraf	19	12	1	6	19	0
084 - Tuntutan Nafkah Anak Tak Sah Taraf	2	1	1	0	2	0
099 - Lain-lain	23	10	4	9	23	0
JUMLAH	1423	834	246	343	1423	0

Statistik Kasus SULH Mengikut Jenis Kasus Tahun 2016-2019¹⁵

Berdasarkan masalah diatas, dapat menarik perhatian penulis untuk mengangkat permasalahan berkaitan *mut'ah* bagi istri yang diceraikan sebelum digauli dan penetapan tuntutan *mut'ah* khususnya di Negeri Sembilan, Malaysia. Hal ini karena masih ramai lagi masyarakat di Negeri Sembilan, Malaysia tidak mengetahui bahwa masalah ini bisa dituntut di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan, berdasarkan Seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan Tahun 2003.

¹⁵ www.jksns.ns.gov.my.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pembahasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Bagaimana Status Bayaran *Mut'ah* Bagi Isteri Yang Dicerai Sebelum Digauli Menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003?
2. Kadar bayaran *mut'ah* menurut undang-undang dan hukum islam.
3. Bagaimana Prosuder untuk menuntut *mut'ah* bagi isteri yang dicerai sebelum digauli menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003?

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesimpang siuran dalam pembahasan ini maka penulis perlu memberi batasan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah status bayaran *mut'ah* Bagi Isteri Yang Dicerai Sebelum Digauli Menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003. Selain itu, Prosuder untuk menuntut *mut'ah* bagi isteri yang dicerai sebelum digauli menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003, serta kadar bayaran *mut'ah* menurut undang-undang dan hukum islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dinyatakan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ingin mengetahui bagaimana status *mut'ah* bagi isteri yang diceraikan sebelum digauli menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003.
2. Ingin mengetahui tentang kadar bayaran *mut'ah* bagi isteri yang diceraikan sebelum digauli menurut undang-undang dan hukum Islam.
3. Ingin mengetahui bagaimana cara untuk menuntut *mut'ah* bagi isteri yang diceraikan sebelum digauli menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003 dan Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap *khasanah* ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya bagian hukum Islam.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pustaka dalam memberi informasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa khususnya. Dan sebagai rujukan dan referensi para pemerhati dan praktisi hukum yang ingin berkembang dan mengembangkan hukum di Indonesia dan Malaysia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Penelitian ini untuk melengkapi persyaratan gelar Sarjana Hukum Islam Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

F. Kerangka Teori

1. *Mut'ah al-Talaq*

Secara bahasa *mut'ah* yang berasal dari kata *mata'* berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan, dan menyenangkan. Secara bahasa kata *mut'ah* berarti manfaat atau kenikmatan yang merupakan penyempurna dari kebutuhan yang pokok atau mempertahankan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Adapun *mut'ah talak* dalam istilah *fuqaha* diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada istri yang ditalaknya setelah talak dilakukan.¹⁶

Mut'ah dengan mendhommahkan *mim* dan terkadang dibaca *mut'ah* dengan mengkasrah *mim* berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara difinitive, makna “*Mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara thalaq”.¹⁷

¹⁶ Muhammad Rowas Qal_ajî dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu., jam lugah alFuqahâ*”, h. 401

¹⁷ Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1997, hlm. 317

2. Perceraian

Perceraian diambil dari kata cerai dan dalam bahasa arab disebut *talaq* yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan¹⁸. Secara bahasa (etimologi), *talak* artinya melepaskan atau meninggalkan atau berakhirnya hubungan perkawinan. Didalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd membahagikan talak kepada dua bagian yaitu *Talak Bain* dan *Talak Raj'i*. Fuqaha telah sependapat bahawa talak itu ada dua macam, yaitu *talak bain* dan *talak raj'i*. *Talak raj'i* ialah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan *talak raj'i* ini disyariatkan pada istri yang telah digauli. Kesepakatan mereka ini didasarkan atas firman Allah :

وَأَحْصُوا وَأَتَّقُوا
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَلْعَدَّةَ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. 14, h. 861

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru¹⁹.

Dalam hal ini tidak ada silang pendapat lagi mengenai *talak bain*, *fuqaha* sependapat bahwa talak tersebut terjadi karena belum terdapatnya pergaulan, karena jumlah bilangan talak dan penerimaannya ganti pada *khulu'*, meski masih diperselisihkan diantara *fuqaha*, apakah *khulu'* itu talak atau *fasakh*²⁰.

3. Hak Isteri

Hak dari sudut bahasa ialah benar, kebenaran, kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain.(kamus dewan.2002.428). Menurut istilah hak ialah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai, baik yang berupa benda mahupun yang berupa wewenang dan kewajiban ialah sesuatu yang perlu diberikan, baik yang berupa benda mahupun yang berupa perbuatan.(syafii.1995.273).

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* At-Talaq 1

²⁰ Ibnu Rusyd "*Bidayatul Mujtahid* Hlm: 538-539.

Firman Allah SWT :

وَالْمَطَاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجُلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلهنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلِيهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”²¹

Terdapat beberapa hak yang wajib suami tunaikan ke atas isteri berdasarkan nas al Quran dan hadith Nabi antaranya hak mahar, hak nafkah, hak mendapat hubungan komunikasi yang baik, hak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar, hak terhadap harta sepencarian, dan beberapa hak asasi wanita yang akan disebut penulis di dalam kertas kerja ini antaranya hak wanita untuk bersuara, hak untuk bekerja dan hak terhadap hartanya sendiri.

4. Mahar isteri

Mahar merupakan hak mutlak isteri yang tidak boleh diambil oleh suami sesuka hati melainkan dengan keredhaan dan keizinan isterinya. Seorang suami boleh berhutang mahar kepada isterinya dengan syarat

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* Al-baqarah 228

ianya wajib dilunaskan kembali. Suami yang tidak mahu membayar mahar yang dihutang kepada isterinya diancam Allah dengan ancaman yang sama dengan orang-orang yang berhutang dengan niat tidak mahu melunasinya padahal mereka mampu untuk membayarnya kembali. Keadaan ini jelas merupakan penderhakaan terang-terangan terhadap hak isteri, sekaligus menderhakai Allah.

Biasanya suami menganggap bahawa mahar itu tidak perlu lagi diberikan kepada isterinya kerana sudah menjadi satu keluarga hingga menurut anggapannya tidak ada lagi perhitungan hutang piutang bagi mereka yang telah mempunyai ikatan sebagai suami isteri.

Dalam situasi ini isteri boleh menasihati dan mengingatkan suami akan hutang maharnya serta ancaman Allah bagi perbuatannya, jika tidak diendahkan, isteri boleh meminta pertolongan dari pihak ke tiga untuk menasihatinya, jika tidak berhasil isteri boleh mengadu kepada mahkamah untuk memaksa suami melunasi hutang maharnya. Namun begitu memaafkan dan mengambil sikap berlapang dada adalah lebih dekat kepada taqwa.

5. Dalil Al-Quran terkait *Mut'ah*

Di dalam Islam, Al-Quran merupakan sandaran utama dalam merujuk segala permasalahan terkait hal dunia mahupun akhirat. Sayogyanya saya katakan terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan berkenaan masalah *mut'ah*. Sama ada dalam konteks isteri tersebut telah digauli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mahupun belum digauli. Antara ayat yang menjelaskan berkenaan *mut'ah* adalah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدَرَهُ. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتْعَا حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

ARTINYA: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan²².

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا مَنَعْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa²³.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعِكُنَّ وَأُسْرِحِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

٢٨

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* Al-Baqarah: 236

²³ *Ibid* 241

ARTINYA: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik"²⁴.

6. Mut'ah Menurut Fiqih Dan KHII

Mut'ah Menurut Fiqih Islam Ulama fikih mendefinisikan *mut'ah* adalah: "Harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian". Kata *mut'ah* sering digunakan untuk menyebut barang atau uang pemberian suami kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasannya²⁵.

Ketentuan tentang *mut'ah* sebagai implikasi yang muncul akibat perceraian didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah 13 ayat 236-237 :

” *ومتعوهنَّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين* ”

....dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (suatu pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula...²⁶

Surat al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "

²⁴ *Ibid* Al-Ahzab: 28

²⁵ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve),133.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* al-Baqarah ayat 236-237

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.²⁷

Surat al-Ahzab ayat 28:14

لَوْ دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلْتُمُوهُمُ لَأَتَوْهُم بِمَا آتَوْهُم بِهَا إِلَّا بِحَسَنٍ

" Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu *mut’ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."²⁸

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa suami wajib memberikan *mut’ah* kepada isteri yang ditalak qabl al-dukhul dan maharnya belum ditentukan.²⁹ Hanya Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum pemberian *mut’ah* itu adalah sunnah³⁰.

G. Tinjauan Pustaka

Terdapat pelbagai referensi berkaitan *mut’ah* yang dapat ditemui, adapun mengenai tulisan dalam bentuk skripsi mahupun jurnal yang membahas tentang bayaran *mut’ah* di antaranya ialah Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Prof. Dr Najibah Mohd Zin dalam kertas kerja yang

²⁷ *Ibid* 241

²⁸ *Ibid* (al-Ahzab): 14

²⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf al-Shayrazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi’i*, (Mesir: Matkbah al-Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th), hal. 80.

³⁰ Al-Imam Sahnun ibn Sa’id al-Tanukhi, *al-Mudawamah al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, 1323), 229. Lihat juga Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Mesir: Shirkah Maktabah waMat}ba’ah Mus}t}afa al-Babi al-Halabi, 1960), 72-73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertajuk Hak Wanita Dalam Islam: Cabaran-cabaran Pemodenan³¹, menyatakan perbincangan tentang hak-hak wanita dalam Islam sentiasa mendapat kritikan bukan hanya oleh masyarakat barat tetapi juga oleh aktivis wanita Islam yang merujuk pemikiran liberal.

1. Rizqia Annisa Paramita, dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Mut’ah* Dalam Putusan Ma RI NO. REG. 441 K/ AG/ 1996” Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 441 K/ AG/ 1996 tentang *mutah*. Untuk mengetahui sejauhmana hukum Islam mengatur tentang pemberian *mut’ah*.
2. Syamsuddin, dalam judul skripsi “Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak *Mut’ah* Mantan Istri Dalam Kajian Empat *Mazhab* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan NO.1151/PDT.GF/2008.PAJS)” Untuk mendeskripsikan hak *mut’ah* mantan istri dalam kajian empat *mazhab* dalam hukum islam.
3. Ade Minur, dalam Judul Skripsi “Pelaksanaan Nafkah *Mut’ah Talak* Suami Kepada Isteri Yang Dicerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2010)” Untuk mendeskripsikan hak nafkah *mut’ah* isteri disebabkan talak suami.
4. Analisis Hukum Formil Dan Hukum Materiil Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara No.

³¹ Prof.Dr Najibah Mohd Zin, *Hak Wanita Dalam Islam: Cabaran-cabaran Pemodenan dari Faculty Of Shariah And Law Sultan Sharif Ali Islamic University*. 11-12 April 2012.

535/Pdt.G/2007Pa.Kds Dalam Hal Pemberian Mut'Ah Terhadap Istri Qobla Dukhul.³²

5. Amal, dalam judul skripsi “Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'Ah Kepada Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³² Analisis Hukum Formil Dan Hukum Materiil Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara No. 535/Pdt.G/2007Pa.Kds *Dalam Hal Pemberian Mut'Ah Terhadap Istri Qobla Dukhul*.

Bab II

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Setiap penelitian, termasuk di dalam skripsi selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument penting dalam penelitian agar terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapailah hasil yang optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yaitu;

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis digunakan untuk mengetahui dalil-dalil, baik al-Qur'an maupun sunnah tentang *mut'ah* dan kitab-kitab fiqh konvensional. Sedangkan dalam pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara *mut'ah* Menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003.

B. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian campuran (Mix Research) yang menggunakan kedua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang mana untuk memperoleh data dari Undang-Undang tersebut harus turun ke

lapangan dan penelitian pustaka (Library Research), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka karena sebgaaian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan *mut'ah* dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh maupun buku-buku yang sudah ada.

C. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan kepustakaan maka dalam hal penulisan skripsi akan mengutamakan dengan menggunakan sumber data asli. Maka sumber digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data baik data primer maupun sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ia merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³³ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan penelitian langsung pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan oleh penulis adalah Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003.

³³Peter Mahmud Rezeki dalam Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan ke-4, Kerinci: Stain Kerinci Press, 2015, hlm. 155.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang bersifat untuk melengkapi data primer. Ia merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.³⁴ Bersangkutan dengan penelitian ini, data sekunder diperoleh adalah melalui bahan-bahan bacaan dalam web. Bahan bacaan seperti buku-buku yang membahas tentang tuntutan *mut'ah* serta artikel atau jurnal yang terkait.

D. Metode Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menggali data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian³⁵. Adapun jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai suatu tujuan. Teknis yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berikut merupakan butiran wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data daripada tempat kajian yang penulis maksudkan :

³⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan ke-4, Kerinci: Stain Kerinci Press, 2015, hlm. 155.

³⁵ Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 47.

1. Nama Pegawai Jabatan Kehakiman Syariah Negeri**Sembilan :** Puan Ruzita Binti Ramli.**2. Jabatan/Pangkat :** Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan.**3. Tanggal Wawancara :** 8 mei 2020**4. Kaedah Wawancara :** Via Email**b. Observasi**

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

c. Studi Dokumentasi

Dalam pengumpulan data, untuk membahas permasalahan yang terkait dengan judul, penulis juga menggunakan metode dokumentasi. Yaitu suatu cara mengumpul data melalui arsip-arsip, buku-buku ilmiah dan apa sahaja yang menjadi sumber sahih yang berkaitan.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji peneliti, maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisa data yang menguraikan gambar dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.³⁶

³⁶ Ibid hlm. 196.

Dengan cara berfikirnya terdiri atas: (a) Penyajian Data, (b) Reduksi Data, (c) penarikan kesimpulan.³⁷

a. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan terkait hubungan antar kategori supaya memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Data dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui beberapa metode, yaitu metode wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Metode wawancara yang penulis gunakan bertujuan mendapatkan data secara langsung di lapangan. Metode observasi yang penulis gunakan adalah untuk mengamati secara jelas bagaimana kaedah tuntutan mut'ah yang dilakukan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan yang menjadi lokasi kajian penulis. Manakala metode dokumentasi yang penulis gunakan adalah untuk menguatkan lagi kajian penulis disamping memenuhi tujuan penelitian penulis yang bersifat Mix Research atau kajian campuran.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya)

³⁷ Ibid

kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan dalam perbahasan skripsi ini menguraikan bab-bab yang saling terkait dan melengkapkan keseluruhan perbahasan ini. Adapun bab-bab ini yaitu:

Bab I : Merupakan Bab pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka.

Bab II : Membahas tentang Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab III : Memberi gambaran umum terkait dengan tempat penelitian seperti sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, Visi, Misi dan Objektif, serta piagam melanggan dan fungsi mahkamah Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bab IV : Berisi tentang kajian penetapan bayaran mut'ah bagi istri yang dicerai sebelum digauli menurut seksyen 58, enakmen undang-undang keluarga islam Negeri Sembilan 2003.

Bab V : Yaitu berkaitan kesimpulan yang merupakan gambaran rangkuman keseluruhan penelitian dan saran-saran sebagai manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian. Kesimpulan bertujuan agar pembaca dapat melihat gambaran seutuhnya dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan (JKSNS) ditubuh berdasarkan kepada Sek.41(1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Sembilan pada 1960. Pada ketika itu dinamakan Mahkamah Kadi yang ditadbir dibawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS).

Pada tahun 1986, telah berlaku penyusunan semula Mahkamah dan dinamakan Mahkamah Syariah. Pada tahun 1991, Mahkamah Syariah telah diasingkan dari pengurusan JHEAINS dan mempunyai pentadbiran sendiri yang dinamakan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan.

JKSNS terdiri daripada Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan 7 buah Mahkamah Rendah. Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Seremban terletak di kawasan yang sama di Seremban manakala Mahkamah Rendah yang lain terletak didaerah-daerah iaitu Kuala Pilah, Tampin, Jelebu, Jempol, Port Dickson dan Rembau. Pusat pentadbiran JKSNS beroperasi di Mahkamah Tinggi Syariah.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan bertanggungjawab mengurus perjalanan kes Mal dan kes Jenayah di semua peringkat Mahkamah; Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan

Mahkamah Rayuan Syariah berdasarkan bidangkuasa yang diberikan di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003, Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.³⁸

Lokasi Penelitian :

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan. Objek pelaksanaan adalah Penerapan Bayaran *Mut'Ah* Bagi Isteri Yang Dicerai Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan. Mahkamah rendah syariah Negeri Sembilan terletak didaerah seremban sehingga membolehkan mahkamah syariah Negeri Sembilan bergabung dengan mahkamah tinggi serta Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan, Malaysia. Lokasi penempatan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Sembilan terletak pada posisi strategik yang menyebabkan masyarakat mudahn untuk pergi kesana dengan tujuan-tujuan tertentu.

³⁸ <http://jksns.ns.gov.my/my/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Lambang Jabatan Kehakiman Syariah, Negeri Sembilan.³⁹



Jata Negeri Sembilan⁴⁰

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

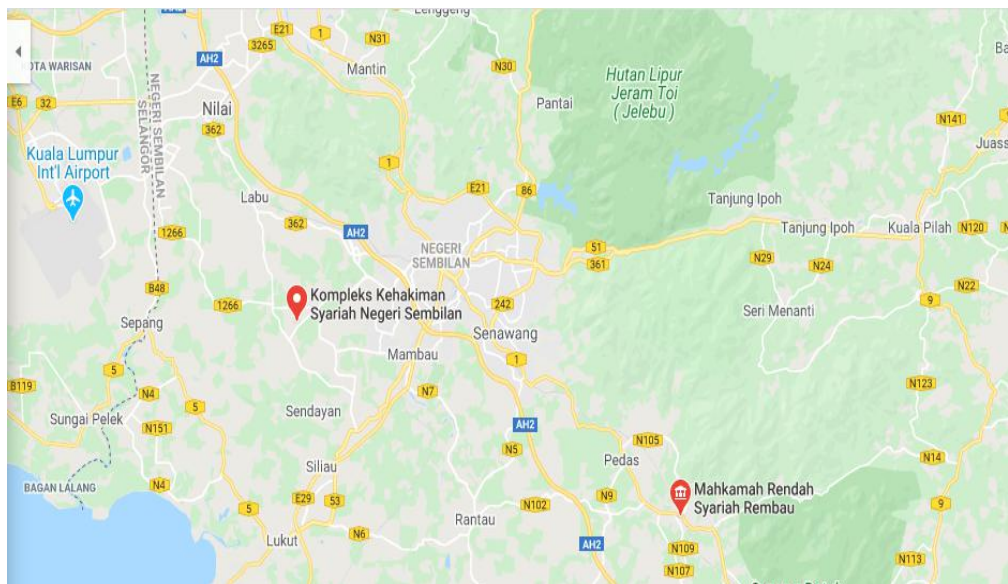
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁹ <http://jksns.ns.gov.my/my/>

⁴⁰ *ibid*

Lokasi Penelitian



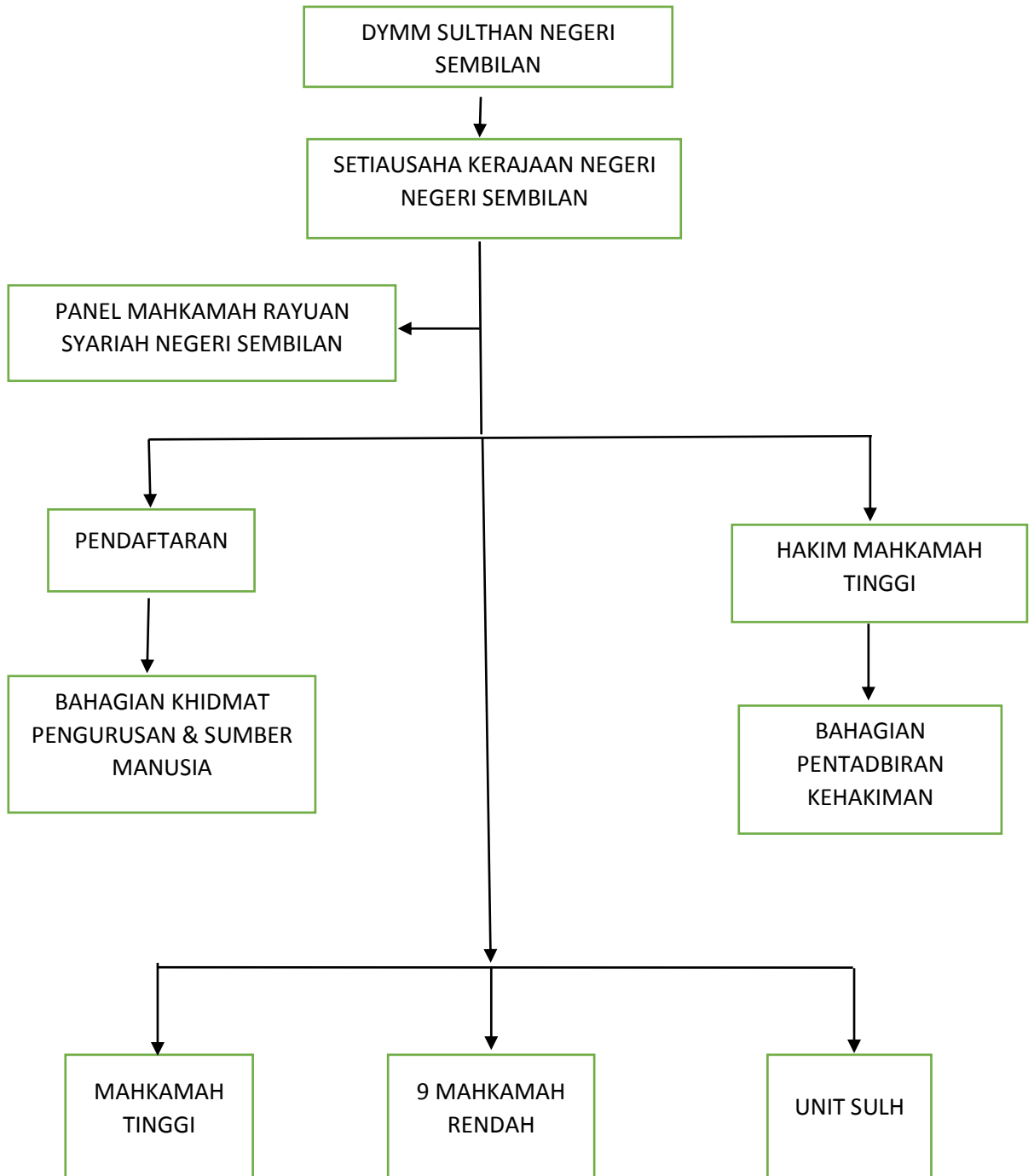
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan, Malaysia.⁴¹

⁴¹ <https://www.google.com/maps/search/jksns/@2.656503,101.8524578,11z?hl=en>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

B. Struktur Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

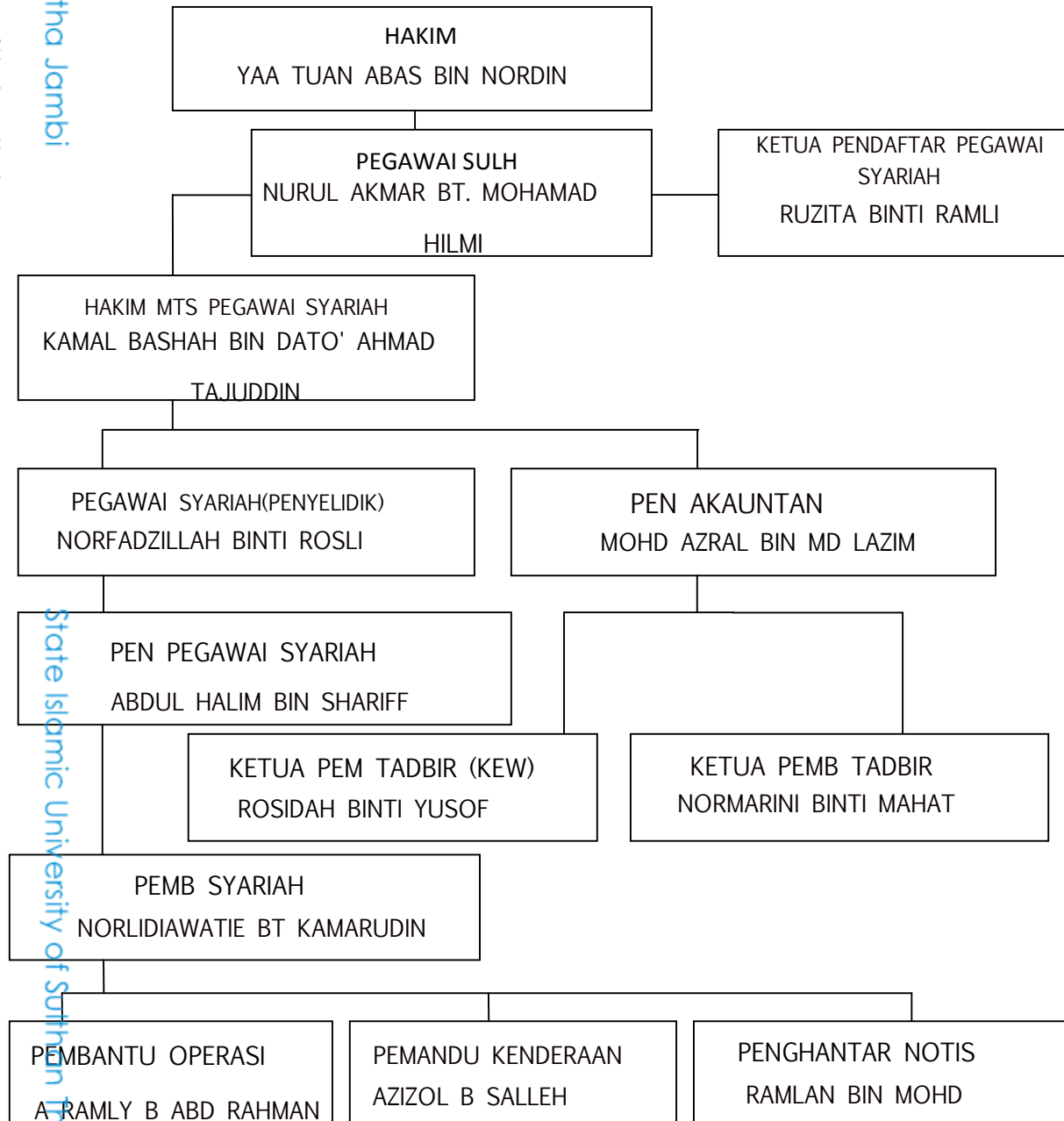
Jika di lihat dari stuktur Organisasi pimpinan yang tertinggi dalam Mahkamah Syariah adalah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Negeri Sembilan (KDYMM). Beliau ini merupakan sultan bagi Propinsi Kelantan. Semua Mahkamah Syariah di Negeri Sembilan di bawah kuasa (KDYMM). Dibawahnya adalah setiausaha kerajaan Negeri Sembilan, Ketua Hakim Syarie pula selepas setiausaha kerajaan Negeri Sembilan, yang mana ia adalah Ketua Hakim bagi seluruh Mahkamah Syariah yang berada di propinsi Negeri Sembilan.

Seterusnya Hakim Mahkamah Tinggi dan Ketua Pendaftar. Di samping KDYMM, berkuasa atas keputusannya terhadap penal Mahkamah Rayuan. Ketua Pendaftar bertugas sebagai menguruskan hal-hal berkait Mahkamah dan juga Pentadbiran. Terdapat satu Mahkamah Tinggi Syariah Propinsi Negeri Sembilan, satu Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Syariah sementara hakim-hakim akan berada di setiap mahkamah rendah Syariah.

Struktur Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan terdiri daripada dua jabatan utama yaitu Jabatan Pentadbiran Kehakiman, dan Jabatan Khidmat pengurusan dan Sumber Manusia. Di mana setiap jabatan mempunyai peran dan fungsi-fungsi tertentu dalam mengendalikan suatu perusahaan tersebut.⁴²

⁴² *Ibid*

C. Carta Organisasi Mahkamah Syariah Negeri Sembilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

D. Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan.

1. Misi

Berkhidmat dengan penuh dedikasi dan amanah bagi menjadikan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan cemerlang dalam melaksanakan keadilan bagi masyarakat Islam di Negeri Sembilan.

2. Visi

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan sebagai sebuah agensi yang cemerlang dalam melaksanakan keadilan berdasarkan Hukum Syarak bagi masyarakat Islam di Negeri Sembilan.

3. Objektif

- a) Mengendalikan kes-kes syariah dengan adil, teratur dan berkesan berasaskan bidangkuasa yang diberikan oleh undang-undang dan perlembagaan selaras dengan kehendak dan prinsip Islam yang terkandung di dalam Al Quran, As Sunnah, Ijmak serta Qias;
- b) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek perundangan dan pengurusan;
- c) Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran;

- d) Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi.⁴³

4. Bidang Kuasa Mahkamah

Seksyen 61. Bidang Kuasa Mahkamah Tinggi Syariah

(a) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Negeri Sembilan dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

(b) Walau apa pun subseksyen (1), Ketua Hakim Syarie boleh bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan mengetuai Mahkamah itu.

(c) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah—

- a) dalam bidang kuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam dan boleh dihukum di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 [En. No. 11/2003] atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam, dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu; dan

⁴³ *Ibid*

- b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu ialah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan—
- (i) pertunangan, perkahwinan, ruju', perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami dengan isteri;
 - (ii) apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subperenggan (i);
 - (iii) nafkah orang-orang tanggungan, kesahatarafan, atau penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak;
 - (iv) pembahagian atau tuntutan harta sepencarian;
 - (v) wasiat atau hibah semasa marad-al-maut;
 - (iv) hibah semasa hidup, atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wang atau nilai wang oleh seorang orang Islam;
 - (vii) wakaf atau nazr;
 - (viii) pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tak berwasiat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- (ix) penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak;
- (x) pengisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam;
- (xi) pengisytiharan bahawa seseorang yang telah mati itu ialah seorang Islam atau sebaliknya pada masa kematiannya; dan
- (xii) perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasa diberikan oleh mana-mana undang-undang bertulis.⁴⁴

Seksyen 62. Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah :

- (1) Sesuatu Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Negeri Sembilan dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
- (2) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah—
 - (a) dalam bidang kuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003

⁴⁴ *Ibid*

atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh Enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis lain itu tidak melebihi tiga ribu ringgit atau pemenjaraan selama tempoh dua tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu; dan

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya, jika amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi seratus ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan wang (tidak termasuk tuntutan hadhanah atau harta sepencarian).

(3) Yang di-Pertuan Besar boleh dari semasa ke semasa melalui perintah yang disiarkan dalam Warta memperluas bidang kuasa mal Mahkamah Rendah Syariah.⁴⁵

5. Fungsi Utama

- a) Menguruskan permohonan pendaftaran kes-kes jenayah iaitu Kes Mal, Kes Jenayah dan Faraid.
- b) Menguruskan perbicaraan kes Mal, Jenayah dan Faraid.
- c) Menguruskan perintah-perintah mahkamah.

⁴⁵ *Ibid*

- d) Menguruskan kes rayuan Mal dan Jenayah.
- e) Menguruskan Surat Akuan Faraid.

KOD ETIKA

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SEMBILAN

1. MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI SEBAGAI

BUDAYA KERJA

Penerapan, penghayatan dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam budaya kerja JKSNS meliputi:-

Amanah Berdisiplin Bertanggungjawab Berdedikasi Tekun Toleransi dan Berbudi Bahasa Bekerjasama Bersyukur dan Terima Kasih Bersedia menerima teguran.

2. BERPEGANG TEGUH KEPADA PRINSIP AKAUNTABILITI DALAM MENJALANKAN TUGAS

Melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah ditetapkan agar mencapai matlamat serta objektif yang diharapkan.

Akauntabiliti meliputi:-

- a. Adil, cepat, cekap dan konsisten dalam membuat
- b. Keputusan
- c. Mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan
- d. Kebertanggungjawaban

3. MENGAMALKAN NILAI PROFESIONALISME DALAM PERKHIDMATAN

Menghayati dan mengamalkan nilai unggul profesionalisme meliputi:-

- a) Proaktif
- b) Profesionalisme, kecekapan dan kemahiran
- c) Komitmen terhadap tugas

6. Kreatif dan inovatif

Motivasi

MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN

- a. Memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan
- b. Layanan adil dan saksama.
- c. Menepati ikrar dan janji dalam Piagam Pelanggan

MENINGKATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN

SEPANJANG HAYAT

- a) Menimba ilmu pengetahuan
- b) Sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran

7. Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN SEKSYEN BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA

Memastikan 50% kes pelanggaran perintah nafkah yang didaftarkan dalam tahun 2017 dan ke bawah dapat diselesaikan melalui rundingcara/tindakan penguatkuasaan perintah di mahkamah syariah melalui Bahagian Sokongan Keluarga.

PIAGAM PELANGGAN UNIT ICT JKSNS

1.1 SISTEM APLIKASI

Memastikan sistem-sistem aplikasi yang digunakan oleh warga JKSNS sentiasa boleh digunakan dengan cekap dan lancar.

Memastikan permohonan baru emel diambil tindakan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas Unit ICT menerima pemakluman kemasukan pegawai baru jabatan.

Memastikan permohonan baru dan pembaharuan tanda tangan digital diambil tindakan dalam tempoh masa 3 hari bekerja selepas permohonan diterima oleh Unit ICT.

1.2 OPERASI ICT

Memastikan peralatan ICT yang dibekalkan kepada pengguna sentiasa beroperasi dengan cekap dan lancar dengan menjalankan penyelenggaraan peralatan ICT dan Perisian ICT 2 kali setahun.

Memastikan khidmat bantuan terhadap masalah komputer yang dilaporkan oleh pengguna dapat diberikan dalam tempoh 3 hari bekerja dari masa laporan diterima. Proses penyelenggaraan dimulakan dalam tempoh tidak lebih daripada 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan laporan/ aduan kerosakan.

1.3 KESELAMATAN ICT

Menjalankan pemantauan dan pengimbasan ke atas rangkaian ICT kerajaan tanpa sebarang prejudis dan prasangka 1 kali sebulan.

Menjalankan penyelidikan dan pengauditan keselamatan ICT secara profesional berpandukan kepada Dasar Keselamatan ICT JKSM.⁴⁶

1.4 LAMAN WEB JKSN

Memastikan Laman Web JKSN boleh dicapai sepanjang masa.

Mengandungi kandungan baharu atau pindaan kepada kandungan yang sedia ada diterima daripada pegawai yang bertanggungjawab terhadap bidang ini dimasukkan ke dalam Laman Web dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh ianya diterima.

⁴⁶ *Ibid*

1.5 MEDIA SOSIAL RASMI JKSN (Facebook Page)

Memastikan media sosial Rasmi JKSN iaitu Facebook Page dikemaskini 12 kali setahun (1 kali dalam sebulan).⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PERBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Status Bayaran *Mut'ah* Bagi Isteri Yang Dicerai Sebelum Digauli

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surah al-ahzab : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ
تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا
(Al-Ahzab : 49)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah Bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. AL-Ahzab : 49)⁴⁸.

Daripada ayat ini, maka terhimpunlah beberapa pandangan para ahli fiqih ahli tafsir dan tidak kurang juga para peneliti yang meneliti berkaitan ayat diatas. Antara pandangan yang diterima oleh kebanyakan ahli hukum adalah pandangan Al Imam Asy-Syafie yang berpendapat bahawa tuntutan *mut'ah* bisa saja dituntut oleh istri yang dicerai sebelum digauli dengan catatan memenuhi beberapa syarat yang disepakati oleh para ulama’.

Berdasarkan pandangan Al-Imam Asy-Syafie, isteri yang dicerai sebelum digauli namun telah ditetapkan mas kawin semasa akad nikah, maka isteri tidak

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* Al-ahzab 49.

berhak mendapatkan *mut'ah*. Sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab Fiqh Manhaji 'Isteri yang diceraikan sebelum persetubuhan, sedangkan mas kahwin telah disebut dalam akad nikah, maka dia tidak berhak mendapat *mut'ah* kerana telah mendapat setengah daripada mas kahwin dan dia belum memberi sesuatu pun kepada suaminya'⁴⁹

Antara syarat yang menjadi kayu ukur dalam permasalahan tuntutan ini ialah :

1. Diceraikan tanpa sebab yang patut menurut syara'.
2. Tidak disebutkan mahar semasa akad nikah.
3. Bukan perceraian atas kemahuan isteri.
4. Perempuan yang ditalak secara *khuluk*.

Syarat-syarat diatas merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama' untuk membolehkan sang istri menuntut *mut'ah* daripada sang suami. Sekiranya syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka mahkamah berhak untuk tidak meluluskan permohonan sang istri untuk menuntut *mut'ah*. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Fathi Bahnasi,

Mut'ah ialah menggantikan kesedihan perceraian seseorang isteri. Oleh yang demikian, isteri yang diceraikan dengan talak khuluk ataupun isteri yang "*mubariah*" dan isteri yang difaraqkan dengan lian tidak berhak menerima *mut'ah* sama ada sebelum atau selepas persetubuhan. Ini adalah kerana isteri

⁴⁹ *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, Ashab Al-Fadhilah Dr.Mustafa Al-Khin, Dr.Mustafa Al-Bugha & Ali Asy-Syarbaji, ms.493, Jilid 2

tersebut yang memilih talak...” Lihat Buku *Nafkah Mut’ah Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang, Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2015, hlm. 293*⁵⁰

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia terkait status bayaran *mut’ah* bagi istri yang diceraikan sebelum digauli, apakah boleh menuntut *mut’ah* bagi istri yang diceraikan sebelum digauli atau tidak. Jawabannya boleh menuntut *mut’ah* bagi isteri yang diceraikan sebelum digauli sekiranya memenuhi syarat-syarat tertentu. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia juga menambah catatan sekiranya jumlah tuntutan *mut’ah* kurang daripada RM100,000(300Jutaan Rupiah) maka tuntutan harus dibuat di Mahkamah Rendah Syariah Negeri. Dan seandainya jumlah tuntutan *mut’ah* melebihi RM100,000 (300Jutaan Rupiah) maka tuntutan harus diajukan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri.⁵¹

Walaupun demikian, sekiranya pemohon tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh mahkamah, maka mahkamah berhak untuk menolak permohonan tersebut dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syarak*. Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syariah Negeri Sembilan adalah berpandukan pada pandangan madzhab al-imam asy-syafie dengan dalil-dalil yang diterima umum.

⁵⁰ Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut’ah Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang*, hlm

⁵¹ <https://web.facebook.com/messages/t/myJKSM/16JAN2020>.

Namun demikian, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia menjelaskan undang-undang keluarga islam di Malaysia membolehkan untuk para istri menuntut mut'ah walaupun pada kasus *fasakh*. Hal ini terjadi karena, dasar yang digunakan oleh Kehakiman bukanlah melihat pada jenis perceraian tetapi melihat pada sebab berlaku perceraian itu sendiri.

Menurut Ahmad Fathi Bahnasi,

“*Mut'ah* wajib diberikan kepada isteri yang ditalakkan dengan syarat talak tersebut bukan atas pilihan isteri. Beliau mengutip beberapa pandangan ulama terkait perihal orang yang berhak menerima mut'ah. Antaranya beliau mengutip pandangan Ibn Hazm yang mengatakan *Mut'ah* wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan atau diserahkan kepada ahli warisnya. Jika mantan suami tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memberikan *mut'ah* samada karena sang suami susah atau ada sedikit lebih daripada makanan hariannya atau makanan harian saudara maranya, maka hendaklah ditentukan kewajiban memberi *mut'ah* itu mengikut tahap kemampuannya...” Lihat Buku *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang, Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2015, hlm.291.*⁵²

Beliau menyebutkan bahawa perceraian yang berhak mendapat *mut'ah* adalah perceraian yang berlaku sebelum persetujuan bagi pernikahan yang tidak disebutkan mahar ketika akad, sama ada mahar tersebut ditentukan atau

⁵² Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang*, hlm

tidak ditentukan selepas akad. Kemudian beliau menambah dengan mengutip pandangan dalam kitab al-bahr ada menyebutkan bahawa *mut'ah* adalah wajib pada pernikahan yang tidak disebutkan mahar semasa akad nikah. Tetapi, isteri berhak mendapat mahar *al-mithl* apabila berlaku persetubuhan. Sebagai contoh, suami menikahi isteri dengan mahar 1000 dirham, kemudian suami mentalakkannya sebelum persetubuhan, maka isteri berhak mendapat 500 dirham tetapi tidak berhak mendapat *mut'ah*. Sekiranya suami sudah menyetubuhinya, maka isteri berhak mendapat mahar *al-mithl* tidak kurang daripada 1000 dirham sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-bayan yang menegaskan bahawa isteri yang ditalakkan wajib mendapat 1000 dirham dan tidak berhak mendapat mahar *al-mithl*. Ini kerana mahar yang disebut dalam majlis akad tidak akan terbatal dengan sebab perceraian. Justeru pemberian *mut'ah* diukur berdasarkan kemuliaan dan kehormatan isteri yang diceraikan.⁵³

Tambahan lagi, penulis juga mendapati kasus yang diputuskan oleh pengadilan agama kudas yang mempertimbangkan permohonan istri yang diceraikan sebelum digauli untuk mendapatkan *mut'ah* daripada sang suami berdasarkan ayat al-Quran surah al-ahzab ayat 49 yang menyatakan bahawa setiap isteri wajib mendapatkan *mut'ah* sama ada sudah digauli ataupun belum digauli. Penulis merujuk pada skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Formil Dan Hukum Materiil Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam*

⁵³ *Ibid.*

*Penyelesaian Perkara No. 535/Pdt.G/2007Pa.Kds Dalam Hal Pemberian Mut'Ah Terhadap Istri Qobla Dukhul.*⁵⁴

Daripada hasil bacaan penulis di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mendapati untuk menentukan boleh atau tidaknya tuntutan *mut'ah* bagi istri yang diceraikan sebelum digauli adalah bergantung pada syarat-syarat mahkamah dan juga pertimbangan hakim dalam mendengar perbicaraan daripada kedua belah pihak.

Berdasarkan pandangan Al-Imam Asy-Syafie, isteri yang diceraikan sebelum digauli namun telah ditetapkan mas kawin semasa akad nikah, maka isteri tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab *Fiqh Manhaji* 'Isteri yang diceraikan sebelum persetubuhan, sedangkan mas kahwin telah disebut dalam akad nikah, maka dia tidak berhak mendapat *mut'ah* kerana telah mendapat setengah daripada mas kahwin dan dia belum memberi sesuatu pun kepada suaminya'.⁵⁵

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib bagi setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian itu sebelum digauli ataupun sesudah digauli. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan sudah ditetapkan maharnya, maka ia hanya mendapat setengah dari mahar yang telah ditentukan. Juga, perempuan yang tidak mendapatkan *mut'ah* adalah perempuan

⁵⁴ Analisis hukum formil dan hukum materiil terhadap dasar pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian perkara no. 535/pdt.g/2007pa.kds dalam hal *pemberian mut'ah terhadap istri qobla dukhul*.

⁵⁵ *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, Ashab Al-Fadhilah Dr.Mustafa Al-Khin, Dr.Mustafa Al-Bugha & Ali Asy-Syarbaji, ms.493, Jilid 2

yang berpisah karena kematian suami, perceraian karena sebab istri, serta perpisahan akibat *li'an*.⁵⁶

Jika kita melihat pandangan para imam yang lain, mereka berbeda pendapat berkenaan tuntutan *mut'ah* bagi siteri yang dicerai sebelum digauli. Para imam yang 4 telah membahaskan berkenaan berkenaan hal ini yang menjadi sumber rujukan kehakiman dikebanyakan negara muslim. Dalam masalah *mut'ah* Imam Malik mengatakan bahwa *mut'ah* dengan adanya *lafadz* المتقين على حقا dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, hanya sunnah. Sementara isteri yang berhak mendapatkan *mut'ah* itu, menurut ulama Malikiyyah, hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia dicerai *qabla al dukhul*. Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-musamma* atas inisiatif isteri, seperti *khulu'* dan *fasakh*, serta perceraian karena *li'an*, tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut tidak secara spesifik menentukan bahwa *mut'ah* itu wajib atau sunnah. Sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibn Syihab, tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan *mut'ah*.⁵⁷

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...287.

⁵⁷ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 5, Beirut: Dar Shadir, tt, hlm. 334

Imam Syafi'i berpendapat, seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya *qabla dukhul* baginya setengah mahar yang sudah ditentukan saat akad nikah. Imam Syafi'i berpegang pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁵⁸

Berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang menentukan secara tegas tentang kewajiban memberikan *mut'ah* bagi wanita yang telah di halaq |. Menurut al-Turmudzy, 'Aṭa', dan al-Nakha'iy perempuan yang di-*khulu'* tetap berhak mendapatkan *mut'ah*. Sementara menurut ulama ahlu al-ra'yi, perempuan yang *dili'an* juga tetap berhak mendapatkan *mut'ah*.⁵⁹

Imam Hanafi mengatakan, suami yang menceraikan istrinya tidak mendapat apapun dari mahar, tetapi istri mendapatkan *mut'ah* saja. *Mut'ah*

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*

⁵⁹ Abu Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubi, *al-Jami' al-Aḥkam al-Qur'an*, Juz 3, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H, hal. 201

diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli, sedang suami belum menentukan mahar untuknya.⁶⁰ Sama halnya seperti yang telah disebutkan oleh Imam As-Sarkhasi, bahwa Imam Hanafi dan Imam Muhammad berpendapat, istri yang diceraikan oleh suaminya *qabla dukhul* hanya mendapatkan mut'ah.

“Dan jika istri diceraikan *qabla dukhul* dengan pendapat Abu Yusuf yang pertama istri mendapatkan setengah dari mahar wajib setelah akad, dan ini untuk mahar *musamma* saat akad lalu kembali lagi dan berkata istri mendapat *mut'ah* dan ini pendapat Imam Hanafi dan Muhammad.”⁶¹

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang *mut'ah* dalam beberapa pasal (salah satunya) menurut (Hanafiah) *mut'ah* itu hukumnya wajib”⁶²

B. Kadar bayaran *mut'ah* menurut undang-undang dan hukum Islam.

Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 622

⁶¹ Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 65

⁶² *Ibid*, hlm. 161

seberat tiga dirham atau bisa dengan barang sebanding berat emas dan perak tersebut.⁶³

Peruntukan seksyen 58 Enakmen undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 merupakan satu-satunya peruntukan berkaitan *mut'ah* atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Peruntukan berkenaan hanya menyatakan hak isteri yang diceraikan terhadap *mut'ah* atau pemberian saguhati daripada suaminya. Bagaimanapun kadar *mut'ah* atau pembayaran tersebut tidak dinyatakan secara khusus tetapi merujuk kepada bentuk wang dalam jumlah yang wajar dan patut mengikut hukum syarak.⁶⁴

Secara umumnya dasar *mut'ah* adalah keredhaan kedua-dua pihak tetapi jika tidak mencapai persetujuan maka penentuan perlu dibuat oleh kadhi atau hakim. Tidak ada penentuan nas atau dalil tentang kadar atau jumlah *mut'ah*. Oleh itu hakim perlu berijtihad mengenai kadarnya. Jika sekiranya suami isteri bertikai mengenai kadar jumlah bayaran *mut'ah* maka *Qadhi* atau Mahkamah boleh menentukan kadar dengan ijtihadnya berdasarkan apa yang sesuai dengan kedudukan atau taraf suami isteri.

Bentuk *mut'ah* dan ukurannya dalam masalah ini telah disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy yaitu:

⁶³ Laila A'rifatin Nuriyati, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Batasan Mahar*, IAIN Walisongo Semarang, 2006

⁶⁴ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor(2003)

⁶⁵واملتعة ان طلقها قبل الوطئ وهي درع ومخار وملحفة وما فرض بعدالعقد

Maksudnya adalah, *mut'ah* diberikan kepada istri yang telah diceraikan oleh suaminya qabla dukhul yaitu dalam bentuk pakaian, khimar, selimut dan sesuatu yang telah disepakati setelah akad.

Dalil yang membahas tentang pemberian *mut'ah* telah disebutkan oleh Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (Al-Ahzab : 49)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁶⁶

⁶⁵ Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy, *Kanz ad-Daqa'iq*, Urdu: Maktabah Rahmaniyyah, tt, hlm. 125

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* al ahzab 49

Ayat di atas menerangkan tentang suatu perceraian yang terjadi dalam pernikahan yang akadnya tidak disebutkan, dengan diwajibkannya *mut'ah* yaitu : adanya lafadzh (فمتعوهن)⁶⁷

Dalam Kitab “*Mughni al-Muhtaj*”, juzuk 3 muka surat 249

“maka apabila bertelingkah kedua pihak tentang kadar, *Qadhi* hendaklah menentukan mengikut budi bicaranya dan mengambilkira apa yang sesuai dengan keadaan kedua-duanya baik dari sudut kekayaan suami dan kesusahan dan keturunan perempuan dan sifatnya”⁶⁸

Ini selari dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

(Yang bermaksud) “Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi *mut'ah* (pemberian saguhati) kepada mereka (yang diceraikan itu). Iaitu: suami yang senang (hendaklah memberi saguhati itu) menurut ukuran kemampuannya; dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian

⁶⁷ Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i Shana'i*, Bairut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 484

⁶⁸ “*Mughni al-Muhtaj*”, juzuk 3/249

saguhati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajiban atas orang-orang (yang mahu) berbuat kebaikan”.⁶⁹

Ayat diatas menyatakan kewajiban oleh syarak untuk membayar *mut'ah* kepada isteri yang telah diceraikan. Nas tersebut juga secara umumnya menetapkan bahawa kadar yang ingin ditetapkan tersebut perlulah mengambil kira faktor kemampuan suami atau defendan samada tergolong dalam golongan senang atau susah.

Kadar bayaran *mut'ah* menurut Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia adalah bergantung putusan hakim ketika mendengar perbicaraan daripada pemohon. Ini terjadi disebabkan tidak adanya dalil khusus yang membolehkan para hakim jadikan sebagai rujukan yang menyebabkan para hakim perlu membuat ijtihad terhadap kasus yang diajukan. Antara pertimbangan hakim dalam menuntukan kadar bayaran *mut'ah* adalah melihat pada tempoh perkahwinan pasangan suami isteri, sumbangan isteri dan juga kemampuan suami.

Pihak mahkamah syariah akan menentukan kadar bayaran *mut'ah* berdasarkan tempoh perkahwinan yang dibina oleh suami isteri. Sekiranya masa perkahwinan yang lama, maka hakim akan melihat sumbangan isteri dan kemampuan suami agar hakim bisa memutuskan bayaran kepada isteri sesuai dengan batasan yang dibenarkan oleh mahkamah bersandarkan syarak. Begitu juga sebaliknya sekiranya, kemampuan suami sekadar yang ada, maka hakim

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* Al-Baqarah 236

menggunakan kebijakan untuk memerintah suami membayar *mut'ah* dengan kadar kemampuannya.

Hal ini selari dengan firman Allah di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁷⁰

Kemampuan suami bermaksud kadar gaji yang diterima oleh suami per bulan yang menjadi garis ukur untuk para hakim menentukan bayaran kepada isteri yang menuntut mut'ah. Hal ini yang menjadikan kasus tuntutan di Malaysia dengan tuntutan yang cukup lumayan tinggi. Sehingga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia meletakkan garis ukur dan panduan untuk kasus

⁷⁰ Ibid

tuntutan mut'ah. Sekiranya tuntutan mut'ah melebihi RM100,000 (300,000,000 Rupiah) maka perlu di tuntutan di mahkamah tinggi syariah.

Hal ini kerana mahkamah rendah hanya membicarakan kasus tuntutan yang tidak melebihi RM100,000(300,000,000 Rupiah) sahaja. Bidang kuasa ini dibahagikan oleh mahkamah, bagi memudahkan pembicaraan kasus yang melibatkan tuntutan yang tinggi bagi golongan tertentu.

Bagaimanapun tuntutan yang dituntut tidak menjamin semuanya akan diluluskan oleh hakim. Ini kerana putusan dibuat berdasarkan ijtihad hakim yang melihat dapa faktor-faktor yang disebutkan tadi.

Ahmad Fathi Bahnasi,

“pandangan imam al-Jassos yang berpandangan kadar *mut'ah* dengan mengambil kira keadaan suami sama ada senang atau susah adalah dibuat dengan cara ijtihad serta sangkaan yang tinggi (*Zan al-ghalib*). Ianya berbeda mengikut peredaran zaman kerana Allah SWT telah mensyaratkan 2 perkara dalam menentukan kadarnya iaitu pertama mengambil kira keadaan suami sama ada senang atau susah dan yang kedua hendaklah pemberian *mut'ah* dengan cara yang makruf yakni patut. Kedua-dua perkara ini perlulah diambil kira dalam menentukan kadar *mut'ah*...”Lihat Buku *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif*

*Syariah dan Undang-Undang, Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2015, hlm 300*⁷¹

Oleh yang demikian, makruf dalam pemberian *mut'ah* bergantung kepada adat kebiasaan manusia setempat. Adat tersebut tentunya berbeza dari satu tempat ke satu tempat dan sentiasa berubah setiap waktu dan ketika. Dengan itu, menjadi kewajiban untuk menjaga dan mengenalpasti adat pada setiap waktu. Ini merupakan asal pada keharusan berijtihad dalam hukum hakam yang baru.

Al-Qummi berkata dari sudut lain pula, pandangan yang mengatakan bahawa hanya keadaan suami sahaja yang diambil kira juga terbatal atau tidak sah. Hal ini kerana sekiranya seorang lelaki yang kaya dan mempunyai kedudukan yang tinggi berkahwin dengan perempuan yang berkedudukan rendah, mahar *ai-mithl*nya adalah beberapa dinar. Sekiranya suami menyetubuhinya, maka wajib diberikan kepada isteri tersebut mahar *al-mithl*, namun apabila tidak ditentukan maharnya, maka *mut'ah* adalah satu dinar.

Sekiranya ditetapkan *mut'ah* berdasarkan keadaan suami, terkadang isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi mendapat *mut'ah* yang lebih banyak dari kadar mahar *al-mithl*. Ini menunjukkan bahawa isteri yang sebelum disetubuhi berhak mendapat kadar *mut'ah* melebihi kadar yang diperolehi oleh isteri yang telah disetubuhi. Ini kerana isteri yang telah disetubuhi hanya berhak mendapat

⁷¹ Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang*, hlm

separuh dari kadar mahar *al-mithl* dan tidak lebih dari itu. Pandangan ini tentunya menyalahi perintah Allah yang mewajibkan *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi mendapat separuh dari kadar *mut'ah* yang berhak diperolehi oleh isteri yang diceraikan selepas berlaku persetubuhan.⁷²

Pandangan yang hanya mengambil kira keadaan suami sahaja tentunya menyalahi makna dan kehendak Al-Quran dan menyalahi adat kebiasaan yang makruf dalam masyarakat. Oleh itu, keadaan kedua-dua pasangan suami isteri hendaklah diambil kira dalam menentukan kadar *mut'ah*.

Mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar *mut'ah* adalah tiga buah baju, rompi (pakaian yang dikenakan orang perempuan diatas baju), kerudung, jubah yang dipergunakan oleh perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki.⁷³

Pendapat ulama kontemporari sheikh Abd al-Wahhab Khallaf berpandangan bahawa terdapat tiga keadaan yang mewajibkan mahar *al-mithl* :

Pertama : Apabila mahar tidak disebutkan semasa akad nikah bagi pernikahan yang sah,

Kedua : Apabila berlaku penafian mahar bahawa ia disebut semasa akad nikah bagi pernikahan yang sah.

Ketiga : Mahar disebut semasa akd nikah tetapi mahar yang tidak sah.

⁷² *Ibid* hlm 301

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 9 hlm 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sekiranya suami menceraikan isterinya ataupun difasakhkan dengan sebab-sebab yang berpunca daripada sang suami sebelum berlaku persetubuhan sama ada secara hakiki atau hukmi, maka wajib ke atas suami memberi *mut'ah* kepada isterinya. Begitu juga hukumnya apabila kedua-dua pasangan setuju untuk nikah secara *mufawidhah* dengan persetujuan untuk menetapkan mahar selepas akad nikah, kemudian suami menceraikan isterinya ataupun difasakhkan dengan sebab-sebab dari pihak suami sebelum berlaku persetubuhan sama ada secara hakiki atau hukmi, maka hukumnya wajib ke atas suami memberi *mut'ah* kepada isteri.⁷⁴

Hal diatas bersesuaian dengan pandangan Imam Abu Hanifah, *mut'ah* diwajibkan dalam dua jenis perceraian, pertama perceraian mufawwidhah (tanpa mahar) sebelum terjadi persetubuhan. Atau disebutkan mahar untuk si istri dengan penentuan rusak. Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat dalam pernikahan yang didalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak. Pendapat ini disepakati oleh jumhur selain mazhab Maliki.⁷⁵

Hikmah disebalik kewajiban *mut'ah* ialah, isteri berhak mendapatkan hak berupa harta selepas merasai kemudaratan akibat perceraian yang bukan berpunca daripadanya. Oleh kerana tidak ditetapkan mahar tertentu semasa akad

⁷⁴ Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang*, hlm

⁷⁵ *ibid*



nikah, maka difardhukan ke atas suami memberi separuh mahar sebagai *mut'ah* kepada isteri seperti yang ditetapkan syarak.

Tujuan pemberian *mut'ah* adalah sebagai sesuatu yang dapat menyenangkan isteri dan diberinya sebagai balasan kepadanya untuk mengubati hatinya dengan sebab perceraian. *Mut'ah* hendaklah sesuatu pakaian yang biasa dipakai oleh seorang perempuan untuk keluar rumah pada adat kebiasaan atau apa yang sama nilai pakaian daripada harta-harta lain ataupun apa-apa balasan.

Oleh yang demikian, para ulama berpendapat bahawa *mut'ah* ialah pakaian yang dipakai oleh seorang perempuan untuk keluar rumah ada adat kebiasaan tempatnya. Maksud pendapat ini bahawa *mut'ah* tidak hanya terbatas pada pakaian, sebaliknya pakaian sebagai *mut'ah* adalah harus sebagaimana harusnya sesuatu yang lain yang senilai dengan *mut'ah* tersebut atau setara dengannya. Turut diambil kira dalam menentukan kadar *mut'ah* adalah keadaan kewangan suami sama ada dia daripada golongan susah, senang atau sederhana.

Perkara yang juga harus diambil kira dalam menentukan kadar *mut'ah* ialah keadaan kedua-dua pasangan suami isteri kerana keadaan isteri yang tinggi kedudukannya berbeda dengan isteri yang rendah kedudukannya. Hal ini bertujuan untuk tidak membebani suami yang fakir dalam membayar *mut'ah* kepada isteri yang kaya. Walau bagaimanapun, disyaratkan *mut'ah* tidak lebih daripada kadar separuh mahar *al-mithl* kerana *mut'ah* itu mnggantikan mahar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ia juga tidak bisa kurang daripada lima dirham karena ia serendah-rendah separuh mahar pada pandangan syarak.

Persoalan yang mungkin bermain di fikiran adalah terkait adakah kewajiban *mut'ah* kekal walaupun masa berlalu?? Seperti yang dinyatakan sebelum ini, *mut'ah* wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan atau kepada ahli warisnya sekiranya dia meninggal dunia. *Mut'ah* tersebut diambil daripada keseluruhan harta si mati dan dilunaskan secara perkongsian bersama orang-orang yang terkait hutang si mati kepada mereka.

Namun, apabila suami atau isteri jahil tentang kewajiban *mut'ah* sehinggalah berlalunya waktu bertahun-tahun, apakah hukumnya?

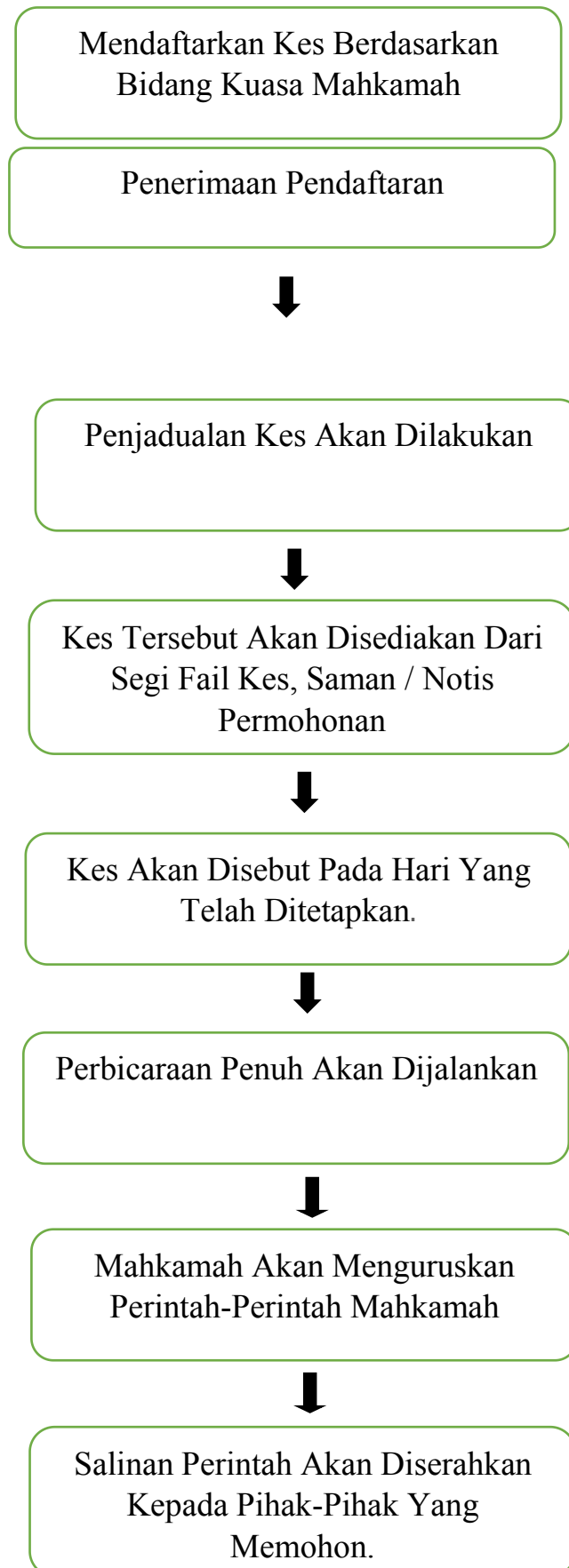
Imam al-Qurtubi mengatakan sesiapa yang jahil tentang kewajiban *mut'ah* sehingga berlalunya masa bertahun-tahun, maka kewajiban *mut'ah* itu tetap kekal. Mantan suami perlu membayar kepada mantan isteri sekalipun mantan isteri tersebut sudah menikah lagi. Sekiranya bekas isteri meninggal dunia, *mut'ah* tersebut hendaklah dibayar kepada warisnya.⁷⁶

C. Prosedur pelaksanaan *mut'ah* menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Sembilan Tahun 2003.

Pelanggan Datang Ke Mahkamah

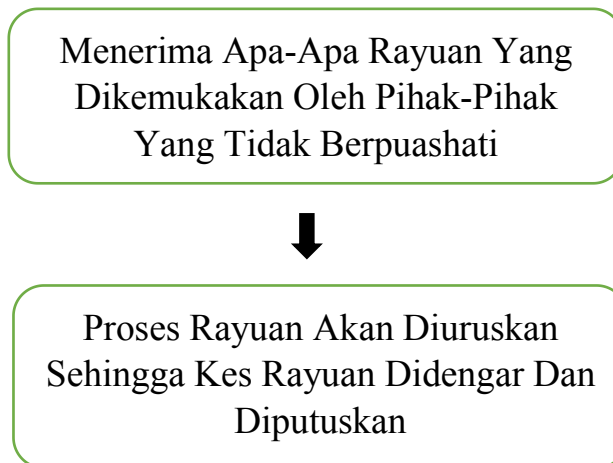


⁷⁶ *Ibid* hlm 313



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Proses utama pengurusan *mut'ah* akan bermula apabila pelanggan datang ke Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rendah Syariah untuk mendaftarkan kes berdasarkan bidang kuasa mahkamah. Serentak dengan penerimaan pendaftaran, penjadualan kes akan dilakukan. Selepas itu kes tersebut akan disediakan dari segi fail kes, saman / notis permohonan dan sebagainya. Kemudian kes akan disebut pada hari yang telah ditetapkan.

Selepas itu, perbicaraan penuh akan dijalankan iaitu setelah segala prosiding dilengkapkan pada hari-hari sebutan yang terdahulu.⁷⁷ Setelah perbicaraan kes selesai dijalankan, Mahkamah akan menguruskan pula perintah-perintah Mahkamah. Salinan perintah akan diserahkan kepada pihak-pihak yang memohon.

⁷⁷ <http://jksm.gov.my/> tanggal 22 mac 2020 jam 11:00am

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Akhirnya, Mahkamah juga akan menerima apa-apa rayuan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak berpuashati terhadap mana-mana keputusan yang telah diputuskan. Proses rayuan akan diuruskan sehingga kes rayuan didengar dan diputuskan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari tulisan ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai titik akhir dari uraian dan kajian penulis. Untuk menyimpulkan titik akhir perbahasan ini, ada baiknya terlebih dahulu penulis mengungkapkan kembali secara selintas pendapat imam madzhab yang lain. Dengan begitu, penulis dapat menerangkan dengan lebih jelas sejauhmana penerapan mut'ah bagi isteri yang diceraikan sebelum digauli.

Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang menyebutkan bahwa kepemilikan mahar itu didasarkan pada adanya dukhul, bukan akad. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik, jika seorang wanita telah didukhul, baik maharnya disebutkan dalam akad maupun tidak disebutkan, maka istri berhak mendapatkan mahar penuh. Pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan pada hadits Nabi, bahwa istri berhak atas karena telah menghalalkan farjinya pada suaminya.

فَلَهَا اِمْلَهْر مَبَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا⁷⁸

“Wanita berhak mendapatkan mahar karena ia telah menghalalkan farjinya”

⁷⁸ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bishri, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 474

Dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik serta hadits yang dipegang sebagai dasar, jika dipahami secara tektual dapat penulis simpulkan seakan seakan memberikan pemahaman bahwa pembayaran mahar oleh laki-laki itu wajib sebagai ganti diberikannya farji wanita kepadanya. Ini mengakibatkan beberapa ulama seperti Imam Syafi'i mengqiyaskan antara pembayaran mahar dalam akad dengan penyerahan farji dan jual beli. Seperti yang telah dikutip oleh al-Mawardi salah satu ulama Syafi'iyah:

“Akan tetapi mahar termasuk hak adamiyah yang bersifat khusus, seperti alat dalam jual beli, atau upah dalam pekerjaan, tidak dapat dijadikan hak milih dengan mencari dan menjadi gugur kepemilikannya dengan adanya pemaafan (istri)”.⁷⁹

Qaul al-Mawardi di atas menjelaskan tentang penyerupaan mahar seperti alat dalam jual beli secara hukum ialah apabila seorang istri belum disetubuhi (qabla dukhul) atau suami belum menikmati farjinya, maka suami tidak dibebani untuk membayar mahar, kecuali dikarenakan dua hal, pertama apabila istri dicerai dan mahar telah ditentukan maka istri berhak atas setengah mahar yang telah ditentukan tersebut, dan yang kedua apabila salah satu dari keduanya ada yang meninggal dunia.

Menurut penulis, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan bahwa adanya mahar dikarenakan sebagai ganti dukhul tersebut di atas seakan-akan meminimalisir dan membatasi fungsi mahar, karena farji

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 481

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dianggap sebagai objek pembelian dengan mahar atau adanya mahar karena sebagai ganti untuk menikmati farji.

Apabila suami menceraikan istrinya qabla dukhul, Imam Hanafi berpendapat bahwa istri tidak mendapatkan bagian dari mahar melainkan hanya mendapatkan mut'ah saja. Imam Hanafi menghukumkan pemberian mut'ah sebagai pemberian yang wajib yang ditunjukkan dengan qaul yang berbunyi:

واعلم أبن العلم أختلفون نف املتعة نف فصولاً حدها ان املتعة واجبة عندان

“ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang mut'ah dalam beberapa pasal (salah satunya) menurut kita (Hanafiah) mut'ah itu hukumnya wajib”.⁸⁰

Imam Hanafi juga menjelaskan tentang kadar mut'ah bagi istri adalah setengah dari mahar mitsil, pendapat Imam Hanafi ini merupakan qiyas dari hukum yang mengatakan bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya qabla dukhul dalam nikah dengan penyebutan mahar di dalamnya, maka hak mahar bagi istri yaitu setengah dari mahar yang telah disebutkan saat akad tersebut.

Akhir sekali, penulis dapat membuat kesimpulan daripada hasil kajian ini berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat sebelum ini.

1. **Status pembayaran *mut'ah* bagi isteri yang diceraikan sebelum digauli menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam**

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamai wa Adillatihi*, juz 7, Bairut: Dar al-Fikr, tt, hlm 161.



Negeri Sembilan 2003, penulis mendapati bahawa terkait pembayaran *mut'ah* adalah atas kuasa hakim mahkamah syariah dengan mengambil kira beberapa keadaan :

- A. Keadaan dan kemampuan suami.
- B. Bukan atas kesalahan isteri.
- C. Perlu membuat permohonan di mahkamah rendah.

2. **Kadar bayaran mut'ah menurut undang-undang syariah negeri sembilan dan hukum islam.** Daripada hasil penelitian ini penulis mendapati beberapa hal terkait kadar bayaran *mut'ah* :

- A. Kadar bayaran bergantung putusan hakim mahkamah setelah menilai kemampuan suami. Hakim akan memberi keputusan yang sesuai dengan kemampuan gaji suami. Walaubagaimanapun hakim tidak meletakkan batas bayaran *mut'ah* tersebut sesuai dengan dalil Qur'an , hadis, dan ijmak ulama'. Para ulama membenarkan hakim berijtihad untuk memutuskan kadar bayaran yang sesuai bagi isteri yang dicerai sebelum digauli.
- B. Sistem mahkamah di Malaysia umumnya menggunakan sistem mahkamah rendah dan mahkamah tinggi. Oleh itu, sekiranya tuntutan bayaran *mut'ah* daripada sang isteri melebihi daripada RM 100,000.00 (Rp 300 juta) maka kasus akan dibicarakan di mahkamah tinggi. Begitu sebaliknya sekiranya tuntutan kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

daripada RM 100,000,00 (Rp 300 juta) maka kasus akan dibicarakan di mahkamah rendah. Begitulah proses peradilan di malaysia terkait tuntutan *mut'ah*.

3. Bagaimana Prosuder untuk menuntut *mut'ah* bagi isteri yang dicerai sebelum digauli menurut Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003?

A. Prosuder tuntutan *mut'ah* adalah dengan cara sang isteri perlu pergi ke mahkamah syariah terdekat untuk membuat laporan sekaligus memberitahu mahkamah berkaitan hal ingin menuntut bayaran *mut'ah*. Hal ini telah disediakan oleh pihak mahkamah sebagai jalan bagi memudahkan para mantan isteri yang ingin membuat tuntutan *mut'ah*.

Demikianlah kesimpulan yang dapat penulis berikan.

Semoga hasil penelitian ini memberi manfaat kepada masyarakat diluar sana khususnya masyarakat di Negeri Sembilan.

B. SARANAN

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis peneliti, ada beberapa saran yang bisa peneliti kemukakan seperti berikut:

1. Pihak berkuasa berwenang perlu menjalankan sesi penerangan secara berterusan kepada masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan *mut'ah* supaya masyarakat terutama isteri lebih cakna tentang hak mereka.

2. Pihak mahkamah perlu memberi pendedahan kepada masyarakat tentang undang-undang keluarga islam dari semua jenis undang-undang bagi memudahkan masyarakat memahami hak dan tanggungjawab mereka.

C. KATA PENUTUP

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam atas petunjuk dan redhonya dapatlah penulis mengakhiri penelitan skripsi yang sederhana beserta segenap usaha yang semampunya, meskipun banyaknya halangan, hambatan, rintangan dan dugaan yang berliku namun ia bukanlah menjadi suatu halangan buat penulis melainkan menjadikannya sebuah motivasi berguna agar bisa mencapai kejayaan yang diimpikan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, bahkan masih banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Maka dari sudut hati yang paling dalam serta kerendahan hati ,penulis mengharapkan segala kritikan dan teguran yang membina untuk masa akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy, *Kanz ad-Daqa'iq*, Urdu: Maktabah Rahmaniyyah.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bishri, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H.

Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Shayrazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, (Mesir: Matkbah al-Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th).

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Ahmad Fathi Bahnasi, *Nafkah Mut'ah Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang*.

Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie, Ashab Al-Fadhilah Dr.Mustafa Al-Khin, Dr.Mustafa Al-Bugha & Ali Asy-Syarbaji.

Al-Imam Sahnun ibn Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawamah al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, 1323).

Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Asy-Syaikh al-Imam Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali, *al-Mahdzab fii Fiqhi al-Imam asySyafi'i*, Juz 2, Dar Al-Fikr.

CD al-Maktabah al-Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*,

Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Istiadah, *Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Dalam Islam*, cet. Ke-1.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet. 1, h.1.

Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 5, Beirut: Dar Shadir.

Muhammad Rowas Qal_ajî dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu., jam lugah alFuqahâ* .

Peter Mahmud Rezeki dalam Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan ke-4, Kerinci: Stain Kerinci Press, 2015.

Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1993.

Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1997.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M.

B. Jurnal, Skripsi, Surat Kabar Dan Undang-undang.

Analisis Hukum Formil Dan Hukum Materiil Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara No. 535/Pdt.G/2007Pa.Kds Dalam Hal Pemberian Mut’Ah Terhadap Istri Qobla Dukhul.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor(2003).

Laila A'rifatin Nuriyati, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Batasan Mahar*, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

Prof. Dr. Najibah Mohd Zin, *Hak Wanita Dalam Islam: Cabaran-cabaran Pemodenan dari Faculty Of Shariah And Law Sultan Sharif Ali Islamic University*. 11-12 April 2012.

C. Lain-Lain

[http://guamansyariah.blogspot.com/2013/03/kes-tuntutan-mutah-yang dilaporkan_2.html](http://guamansyariah.blogspot.com/2013/03/kes-tuntutan-mutah-yang-dilaporkan_2.html).

<http://jksns.ns.gov.my/my/>.

<http://jksm.gov.my/> tanggal 22 mac 2020 jam 11:00am.

<https://web.facebook.com/messages/t/myJKSM/16JAN2020>.

<https://www.google.com/maps/search/jksns/@2.656503,101.8524578,11z?hl=en>.

CURRICULUM VITAE



Nama : L. ilham bin Ruddy

NIM : SHK 101180029

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga (HK)

Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia / 20 November 1996

Alamat Asal : Sabah, Malaysia

Alamat Sekarang : Mess Pelajar Malaysia, No. 44, RT.24,
RW. 08, Jalan Melur 2, Kelurahan Simpang IV
Sipin, Telanaipura, 36124, Jambi, Indonesia.

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan :

No	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1	Sekolah Kebangsaan Pekan 1	Sabah, Malaysia	2003- 2008
2	Sek, Men, Keb Agaseh.	Sabah, Malaysia.	2009 - 2013
3	Unifield International College	Negeri Sembilan, Malaysia.	2014 - 2017
4	UIN STS JAMBI	Jambi,Indonesia.	2018 - 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi